

**LAPORAN KEGIATAN
PROJECT DATA ANALYTIC**



Muhammad Bayu Riyadi (19950305 201801 1 002)

BPKP Perwakilan Provinsi Papua

BAB I

DATA UMUM OBJEK PENGAWASAN

A. Gambaran Umum Topik Pengawasan

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pasal 26 dimana salah satu tugas dan fungsi BPKP adalah sebagai pelaksana tugas pembantu Kepala di bidang pelaksanaan pengawasan kelancaran pembangunan termasuk program lintas sectoral, pencegahan korupsi, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit penghitungan kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan ahli.

Dalam pelaksanaannya, Audit Investigatif (AI) ataupun Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dapat dilaksanakan berdasarkan hasil pengembangan kegiatan pengawasan, pengaduan masyarakat, permintaan pimpinan objek penugasan atau pimpinan K/L/P/Korporasi yang membawahi/pemilik objek pengawasan dan permintaan instansi Penyidik. Pada perwakilan dengan sumber daya yang terbatas, pelaksanaan AI ataupun PKKN sangat dominan berasal dari permintaan Instansi Penyidik. Oleh karena itu hubungan yang baik antara Perwakilan dengan Instansi-Instansi Penyidik perlu dijaga, dimana salah satu upaya yang dapat dilakukan yakni respon pemenuhan permintaan AI ataupun PKKN.

Disamping kegiatan represif AI dan PKKN, BPKP juga memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan upaya preventif atau pencegahan korupsi melalui kegiatan *Fraud Control Plan* (FCP), *Fraud Risk Assessment* (FRA), Profiling Risiko, Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK) ataupun kegiatan lainnya. Bidang Investigasi selaku pelaksana yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup penindakan ataupun pencegahan kasus korupsi memiliki keuntungan untuk memetakan wilayah-wilayah yang kiranya dapat diprioritaskan untuk dilakukan pencegahan korupsi berdasarkan pengawasan-pengawasan represif yang dilakukan.

B. Identitas Obyek Pengawasan

Objek Pengawasan adalah:

1. Permintaan/permohonan Audit Investigatif dan Audit PKKN dari pihak Penyidik Tahun 2016 sampai dengan April 2022;

2. Hasil pengawasan atas Audit Investigatif dan Audit PKKN yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Papua Tahun 2016 sampai dengan April 2022;
3. Hasil pengawasan FCP, FRA, MPAK, Profiling Risiko yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Papua Tahun 2018 sampai dengan April 2022.

C. Matrik Desain Pengawasan

No.	Pertanyaan Audit	Kriteria Digunakan	Informasi Dibutuhkan dan Sumber	Metode/Teknik Pengumpulan Informasi	Metode Analisis Dipergunakan	Keterbatasan/Resiko	Antisipasi Resiko	Prakiraan Hasil
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Apakah Perwakilan mampu memenuhi permintaan AI/PKKN dari Penyidik setiap tahun?	1. Perpres No 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 2. Peraturan Badan BPKP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi	1. Jumlah permintaan AI/PKKN dari Penyidik Tahun 2016 s.d 2022 2. Jumlah penugasan AI/PKKN Tahun 2016 s.d 2022	Document Review	Analisis Deskriptif	Database tidak terupdate	Pencocokan dengan Dokumen Sumber	Persentase Pemenuhan Permintaan AI/PKKN Penyidik Tahun 2016 sampai dengan April 2022
2	Seberapa banyak kegiatan represif BPKP atas terjadinya kecurangan? (khusus AI dan PKKN)	1. Perpres No 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 2. Peraturan Badan BPKP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi	1. Jumlah permintaan AI/PKKN dari Penyidik Tahun 2016 s.d 2022 2. Jumlah penugasan AI/PKKN Tahun 2016 s.d 2022	Document Review	Analisis Deskriptif	Database tidak terupdate	Pencocokan dengan Dokumen Sumber	Hasil analisis kegiatan represif AI dan PKKN Tahun 2016 sampai dengan April 2022
3	Apakah kegiatan Preventif dari Perwakilan yang dilakukan telah memperhatikan wilayah-wilayah yang tingkat keterjadian korupsinya tinggi	1. Perpres No 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 2. Peraturan Badan BPKP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi	Jumlah penugasan AI/PKKN Tahun 2019 s.d April 2022 Jumlah penugasan pencegahan (FCP, MPAK, FRA, Profiling Risiko) Tahun 2019 s.d April 2022	Document Review	Analisis Deskriptif	Database tidak terupdate	Pencocokan dengan Dokumen Sumber	1. Sebaran lokus pemeriksaan yang dilakukan Tahun 2016 sampai dengan April 2022; 2. Urutan wilayah berdasarkan keterjadian AI dan PKKN dan upaya kegiatan represif yang telah dilakukan

BAB II KEGIATAN ANALISIS DATA

A. Kegiatan Analisis Data

Analisis Data dilakukan menggunakan aplikasi Ms. Excell dan PowerBI, Adapun untuk data yang digunakan berasal dari:

1. Database Bidang Investigasi BPKP Perwakilan Provinsi Papua Tahun 2016 sampai dengan April 2022 (meliputi rekapan surat permintaan, laporan forum komunikasi, database pengawasan, dsb).
2. Dokumen asli yakni surat permintaan/permohonan dari Instansi Penyidik dan Laporan AI serta PKKN yang telah diterbitkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Papua Tahun 2016 sampai dengan April 2022

Data-data tersebut kemudian dilakukan penginputan/pengeksporan dataset kedalam Microsoft excell dan dilakukan *cleansing* data untuk membuang data-data yang tidak diperlukan. Data yang sudah *dicleansing* kemudian dilakukan analisis sesuai kebutuhan dari tujuan masing-masing pernyataan audit untuk kemudian dilakukan visualisasi dan interpretasi atas data-data tersebut dengan bantuan dari PowerBI.

B. Uraian Analisis Data dan Hasilnya

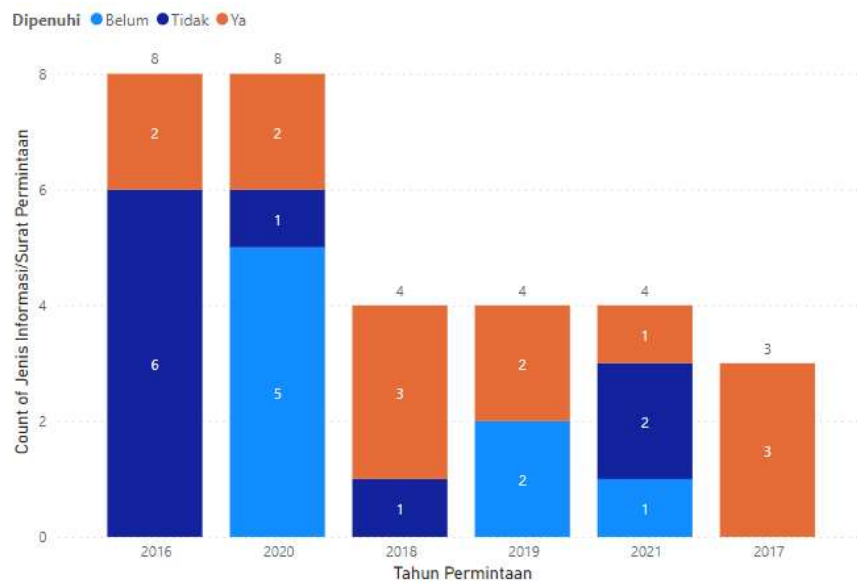
Berdasarkan analisis data dengan metode analisis deskriptif diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Total permintaan dari Instansi Penyidik Tahun 2016 sampai dengan April 2022 adalah sebagai berikut:

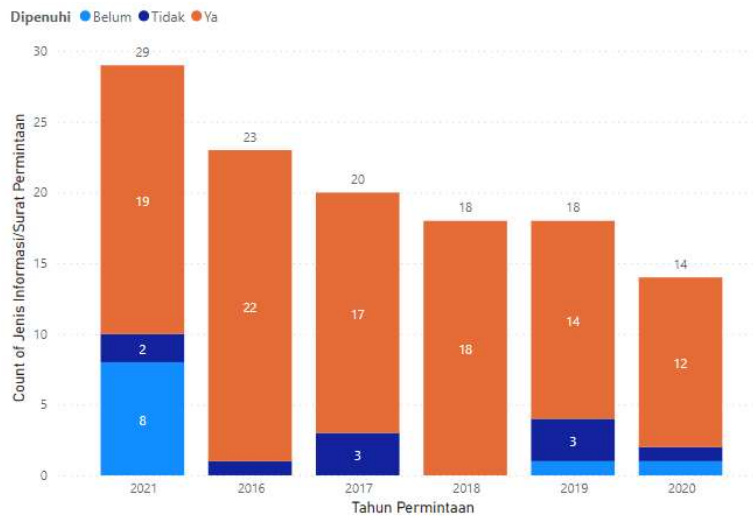
No	Tahun	Jenis Permintaan	Jumlah Surat Permintaan	Jumlah Pemenuhan Permintaan	Persentase Pemenuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)*100
1	2016	AI	8	2	25.00
		PKKN	23	22	95.65
2	2017	AI	3	3	100.00
		PKKN	20	17	85.00
3	2018	AI	4	3	75.00
		PKKN	16	16	100.00
4	2019	AI	4	2	50.00
		PKKN	18	14	77.78
5	2020	AI	8	2	25.00

No	Tahun	Jenis Permintaan	Jumlah Surat Permintaan	Jumlah Pemenuhan Permintaan	Persentase Pemenuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)*100
6	2021	PKKN	14	12	85.71
		AI	4	1	25.00
		PKKN	29	19	65.52
7	s.d April 2022	AI	1	0	0.00
		PKKN	0	0	0.00
Total			152	113	74.34

Pemenuhan Permintaan AI 2016 sampai dengan April 2022

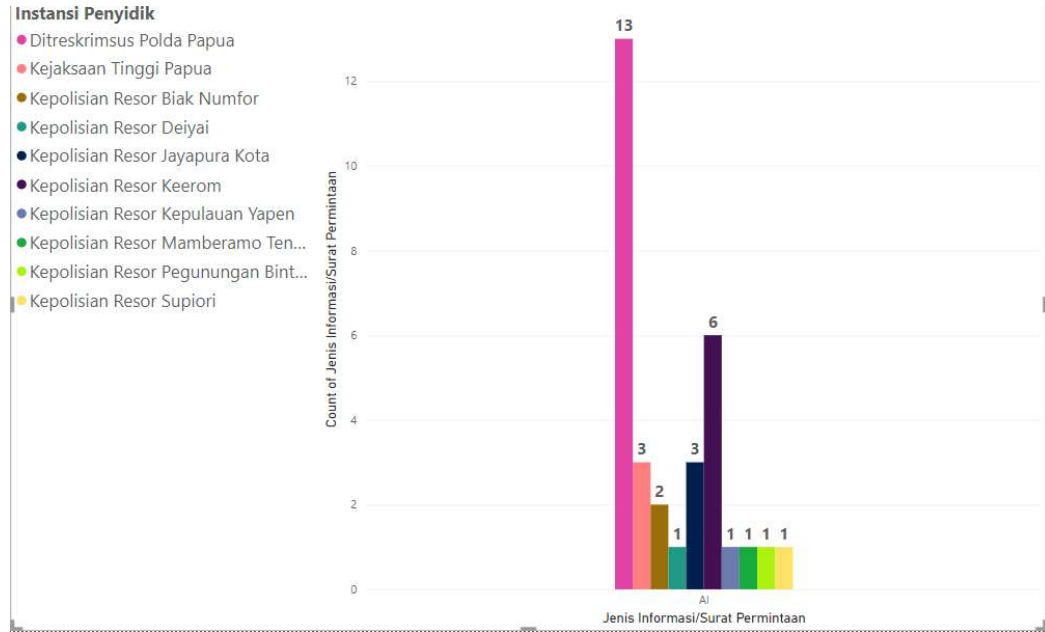


Pemenuhan Permintaan PKKN 2016 sampai dengan April 2022

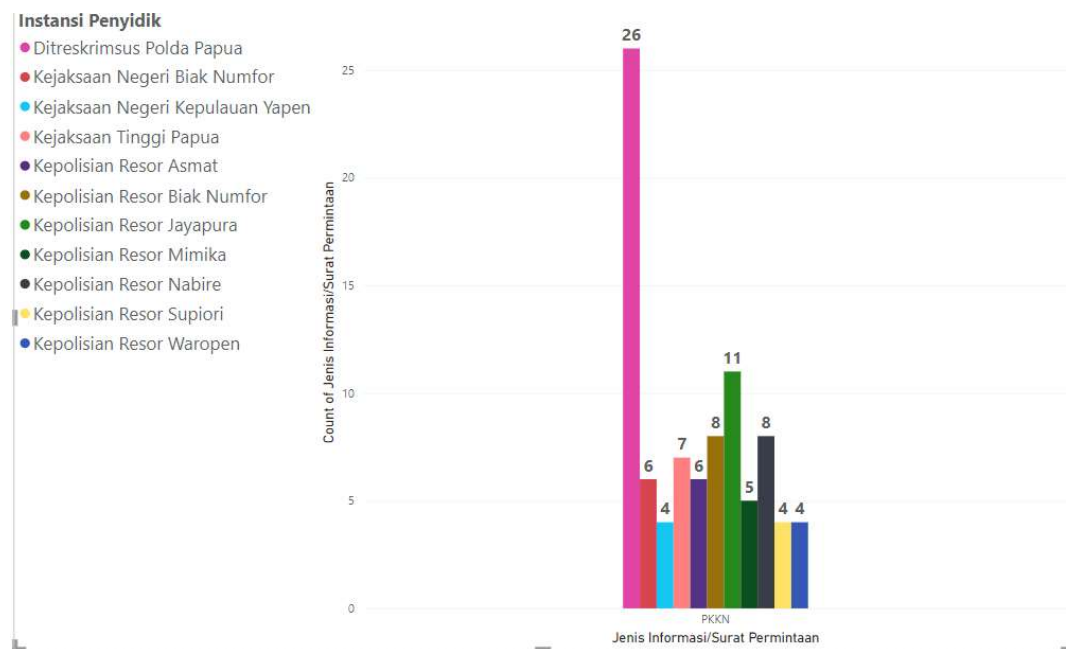


Adapun untuk Instansi-Instansi dengan permintaan terbanyak selama Tahun 2016 sampai dengan April 2022 untuk masing-masing pengawasan adalah sebagai berikut:

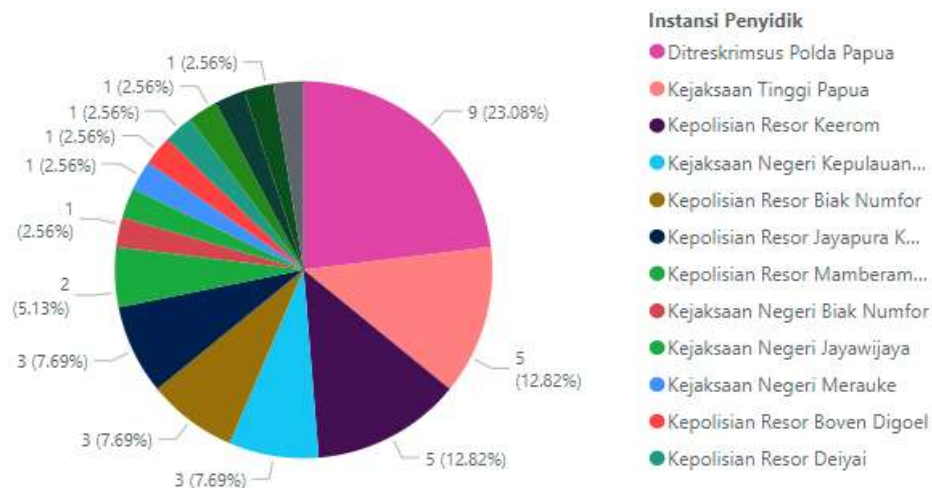
Audit Investigatif



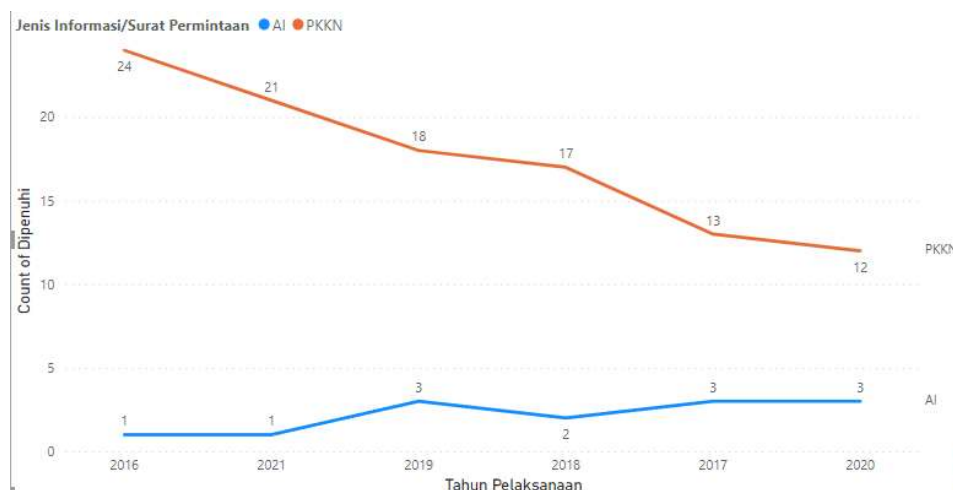
Audit PKN



Dari hasil tersebut, total persentase permintaan AI dan PKKN yang telah ditindaklanjuti selama tahun 2016 sampai dengan April 2020 adalah sebesar 74,34% dengan Instansi Penyidik yang permintaan/permohonan tidak/belum ditindaklanjuti paling banyak adalah:

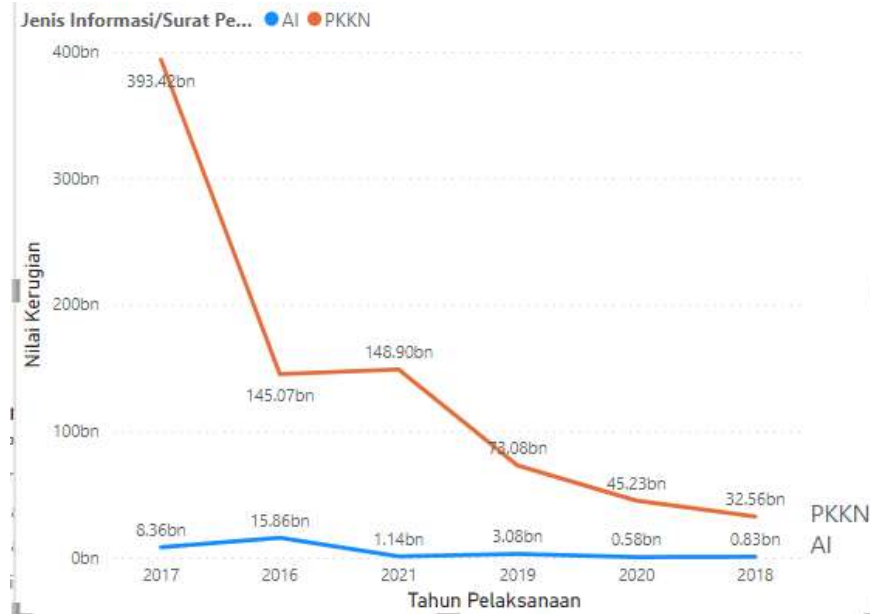


2. Selama tahun 2016 sampai dengan April 2022, total kegiatan represif atas terjadinya kecurangan yang dilaksanakan oleh perwakilan BPKP Provinsi Papua adalah sebagai berikut:



perbedaan jumlah kegiatan yang dipenuhi dikarenakan data pada sumbu x yang digunakan pada pengujian ini adalah tahun pelaksanaan pengawasan, sedangkan data pada sumbu x pada pengujian nomor 1 menggunakan tahun permintaan/permohonan Instansi Penyidik.

Adapun tren jumlah kerugian/potensi kerugian keuangan negara dari hasil pengawasan yang dilakukan (AI dan PKKN) oleh BPKP Perwakilan Provinsi Papua selama tahun 2016 sampai dengan April 2022 adalah sebagai berikut



3. Dari tahun 2016 sampai dengan April 2020 telah dilaksanakan sebanyak 118 kali penugasan Represif dengan rincian 105 kegiatan berupa pengawasan audit PKKN dan 13 kegiatan berupa pengawasan AI dengan sebaran/lokus pemeriksaan adalah sebagai berikut



Adapun selama tahun 2017 sampai dengan April 2022 telah dilaksanakan kegiatan Preventif berupa:

Tahun	Kegiatan	Lokus Pemeriksaan
2017	Sosialisasi Program Anti Korupsi (Sospak) dalam rangka Pengembangan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK) Tahun 2017 di Kabupaten Tolikara	Kabupaten Tolikara
	Sosialisasi Fraud Control Plan (FCP) pada PD Irian Bhakti	Provinsi Papua
	melakukan Lanjutan Diagnostic Assesment Fraud Control Plan (FCP) pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Merauke	Kabupaten Merauke
2018	Penilaian Risiko Kecurangan atas Program Prioritas Nasional Ketahanan Pangan pada Kegiatan Prioritas Pembangunandan Rehabilitasi Jaringan Irigasi oleh Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Papua	Provinsi Papua
	Penilaian Risiko Kecurangan atas Program Prioritas Nasional Ketahanan Pangan pada Kegiatan Prioritas Perbaikan Data Statistik Pangan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Papua	Provinsi Papua
	Penilaian Risiko Kecurangan atas Program Prioritas Pendidikan Vokasi terkait Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan	Provinsi Papua
	Penilaian Risiko Kecurangan atas Program Prioritas Pendidikan Vokasi terkait Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 yang telah dilaksanakan oleh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Jayapura	Provinsi Papua
	Sosialisasi Program Anti Korupsi (Sospak) dalam rangka Pengembangan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK) Tahun 2018 di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Jayawijaya	Kabupaten Jayawijaya
	Sosialisasi Fraud Control Plan (FCP) Tematik sistem Whistle Blowing pada Inspektorat Kabupaten Jayapura	Kabupaten Jayapura
	Sosialisasi Fraud Control Plan (FCP) pada Inspektorat Kabupaten Jayawijaya	Kabupaten Jayawijaya
	Penilaian Risiko Kecurangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Dinas Perhubungan Kota Jayapura	Kota Jayapura
2019	Penilaian Risiko Kecurangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat	Kabupaten Asmat
	Penilaian Risiko Kecurangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung dan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jayapura	Kabupaten Jayapura
	Penilaian Risiko Kecurangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire	Kabupaten Nabire

Tahun	Kegiatan	Lokus Pemeriksaan
	Penilaian Risiko Kecurangan (Fraud Risk Assessment) atas Kegiatan Prioritas Percepatan Penurunan Stunting pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boven Digoel	Kabupaten Boven Digoel
	Penilaian Risiko Kecurangan (Fraud Risk Assessment) atas Program Reforma Agraria pada Kantor Wilayah Kementerian ATR/BPN Provinsi Papua	Provinsi Papua
	Sosialisasi Program Anti Korupsi (Sospak) dalam rangka Pengembangan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK) Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura	Kabupaten Jayapura
	Sosialisasi Fraud Control Plan (FCP) pada Inspektorat Kabupaten Jayapura	Kabupaten Jayapura
	Sosialisasi Program Anti Korupsi dalam rangka Pengembangan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire Tahun 2019	Kabupaten Nabire
2020	Kegiatan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK) untuk identifikasi Risiko Fraud pada Proses Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 pada Inspektorat Kabupaten Mimika, Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, dan Dinas Sosial Kabupaten Mimika	Kabupaten Mimika
	Kegiatan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK) untuk identifikasi Risiko Fraud pada Proses Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 pada Inspektorat Kabupaten Jayapura, Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, dan Dinas Sosial Kabupaten Jayapura	Kabupaten Jayapura
	Kajian Risiko Kecurangan atas Program Prioritas Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antarmoda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Provinsi Papua
	Bimbingan Teknis Pengendalian Risiko Kecurangan dalam Penanganan Covid-19 di Kabupaten Keerom	Kabupaten Keerom
	Kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Pengawasan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi Tahun 2020 berupa Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Sekretaris OPD pada Pemerintah Kabupaten Merauke	Kabupaten Merauke
2021	Sosialisasi Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) kepada Satuan Tugas (Satgas) Penilaian Mandiri dalam Proses Penjaminan Kulaitas IEPK pada Kabupaten Keerom	Kabupaten Keerom
	Penyusunan Profil Risiko Fraud terhadap Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) APBD dan Penggunaan Dana Transfer pada Kabupaten Nabire	Kabupaten Nabire
	Kegiatan Penyusunan Profil Risiko Fraud terhadap Perencanaan dan Penggunaan Dana Desa serta Pengelolaan Aset Desa pada Kabupaten Jayapura	Kabupaten Jayapura

Tahun	Kegiatan	Lokus Pemeriksaan
	FCP Tematik Fraud Risk Assessment (FRA) atas Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Bidang Pendidikan pada Pemerintah Provinsi Papua	Provinsi Papua
	FCP Tematik Fraud Risk Assessment (FRA) pada penyelenggaraan PON XX dan PEPARNAS XVI Tahun 2021	Provinsi Papua
	Kegiatan Penyusunan Profil Risiko Fraud terhadap Akuntabilitas Penyelenggaraan PON dan PEPARNAS 2021, Badan Usaha Milik Daerah (PD Irian Bhakti), Dana Otonomi Khusus Bidang Pendidikan serta Riset dan Inovasi Penanganan Covid-19 pada Pemerintah Provinsi Papua	Provinsi Papua
	Penyusunan Profil Risiko Fraud terhadap Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Perencanaan/Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Kabupaten Kepulauan Yapen	Kabupaten Kepulauan Yapen

Dari kegiatan preventif dan sebaran lokus pemeriksaan masih terdapat beberapa kabupaten dengan tingkat keterjadian yang tinggi (tingkat keterjadian >5) namun belum pernah dilakukan kegiatan preventif pencegahan korupsi yakni Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Waropen, Kabupaten Supiori, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Sarmi.

BAB III

PENUTUP

1. Persentase permintaan AI dan PKKN yang telah ditindaklanjuti selama tahun 2016 sampai dengan April 2020 adalah sebesar 74,34% dengan Instansi Penyidik yang permintaan/permohonannya paling banyak tidak dipenuhi adalah Ditreskrimsus Polda Papua sebanyak 9 permintaan, Kejaksaan Tinggi Papua dan Kepolisian keerom sebanyak 5 permintaan.
2. Selama tahun 2016 sampai dengan April 2022, total kegiatan represif atas keterjadian kecurangan yang dilaksanakan oleh perwakilan BPKP Provinsi Papua adalah sebanyak 118 kegiatan dengan rincian 105 kegiatan berupa pengawasan audit PKKN dan 13 kegiatan berupa pengawasan AI.
3. Dari kegiatan preventif dan sebaran lokus pemeriksaan masih terdapat beberapa kabupaten dengan tingkat keterjadian yang tinggi (tingkat keterjadian >5) namun belum pernah dilakukan kegiatan preventif pencegahan korupsi yakni Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Waropen, Kabupaten Supiori, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Sarmi.